

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nama untuk metrik kesejahteraan masyarakat yang dikembangkan oleh UNDP. Sesuai dengan badan pusat statistik (BPS), ada 3 petunjuk yang dipakai untuk mengukur IPM, sebagai berikut:

- Tingkat kesehatan (Angka Harapan Hidup) ditentukan berdasarkan masa depan saat memasuki dunia, atau angka kematian anak baru lahir.
- Tingkat pendidikan (Rata Rata lama sekolah) dapat diperkirakan berdasarkan jumlah individu yang terampil, tingkat pengajaran yang diambil, atau lamanya bersekolah.
- Harapan terhadap kenyamanan sehari-hari diperkirakan melalui pendapatan perkapita.

Dari ketiga komponen IPM diatas, Jadi, guna menghitung indeks pembangunan manusia, rumus umum yang dipakai adalah:

$$IPM = 1/3 (X(1) + X(2) + X(3))$$

Dimana:

X(1) = Indeks Harapan Hidup

X(2) = Indeks Pendidikan

X(3) = Indeks Standar Hidup Layak

BPS membagi capaian IPM menjadi empat kategori: terlalu besar dengan nilai IPM lebih dari 80; sedang dengan nilai IPM lebih dari 60; dan rendah dengan nilai IPM kurang dari 60.

1) Teori Pembangunan Ekonomi

Menurut Hess & C. Ross., (1997) Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan perubahan mendasar dalam struktur sosial, termasuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup melalui akses terhadap makanan, kesehatan, dan pendidikan. TKDD berperan penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia karena dana tersebut dialokasikan untuk meningkatkan layanan dasar yang mencerminkan dimensi kualitatif pembangunan, seperti kesehatan dan pendidikan, yang secara langsung mempengaruhi memperbaiki indeks pembangunan manusia.

2) Teori Desentralisasi Fiskal

Menurut Saragih (2003) Desentralisasi fiskal merujuk pada proses di mana anggaran didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan kewenangan yang telah dilimpahkan. TKDD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan alokasi yang tepat, TKDD dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui perbaikan akses dan kualitas layanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menurut Juliarini Aniek, (2020) dana perimbangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi IPM. Dana perimbangan merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah dan memastikan distribusi sumber daya yang lebih merata. Penggunaan

dana perimbangan memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang esensial, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan adanya dana perimbangan, daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tetap dapat menjalankan program-program penting yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3) Teori Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2002) Implementasi kebijakan publik melibatkan upaya untuk menerjemahkan keputusan-keputusan yang telah diambil menjadi tindakan nyata yang bertujuan mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Formulasi kebijakan publik di tingkat makro yang diatur oleh perundang-undangan seringkali menghadapi tantangan dalam implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kebijakan operasional dan respons kelompok sasaran terhadap kondisi di lapangan. Dalam praktiknya, perbedaan antara visi dan realitas sering muncul, menyebabkan distorsi antara tujuan yang diinginkan dan hasil yang tercapai. Dalam konteks TKDD, jika implementasi kebijakan tidak dilakukan secara efektif atau tidak sesuai dengan tujuan yang direncanakan, maka alokasi dana tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

2.1.2 Dana Transfer Kedaerah dan Dana Desa

Belanja negara mencakup transfer ke daerah dan dana desa, yang merupakan aspek dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana ini terdiri dari dana Perimbangan, Otonomi Khusus, Keistimewahan DIY, Insentif Daerah, dan Dana Desa. Transfer ke daerah dan dana desa dilakukan guna menaikkan dana untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Perimbangan Keuangan

Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bagaimana sumber daya keuangan dapat ditransfer ke daerah.

2.1.2.1 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat umum dan tidak ditentukan penggunaannya. DAU bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah guna melaksanakan desentralisasi fiskal.

Dana Alokasi Umum (DAU) diambil dari pusat adalah membagikan uang dengan suatu tujuan kebutuhan pendanaan dan biaya daerah dalam kerangka desentralisasi. Ini menunjukkan bahwa dana ditransfer dari pusat ke daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk meningkatkan kualitas hidup, standar kehidupan, dan harapan hidup. Dana Alokasi Umum didanai oleh APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. DAU digunakan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk meningkatkan layanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi, peningkatan DAU meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berkontribusi pada peningkatan IPM di wilayah tersebut.

1) Teori Pembangunan manusia

Pembangunan manusia menurut (Amartya sen, 1999) Pembangunan manusia yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan kebebasan individu dalam pembangunan. Pembangunan bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana Masyarakat mendapatkan akses untuk meningkatkan kemampuan dan

kebebasan dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan indikator utama dari indeks Pembangunan manusia seperti Kesehatan, Pendidikan dan standar hidup layak.

Dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat digunakan untuk meningkatkan layanan Kesehatan dan Pendidikan. Alokasi dana ini digunakan untuk memperbaiki kualitas tenaga pengajar dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan. Peningkatan ini berdampak langsung kepada indeks pembangunan manusia.

2) Teori Desentralisasi Fiskal

Dalam arti harafiah, desentralisasi adalah lawan dari sentralisasi, yang berarti pemusatan kekuasaan. Salah satu tujuan bernegara, terutama meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki proses pengambilan keputusan publik, dapat dicapai melalui penerapan desentralisasi. Ada tiga jenis desentralisasi: desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, dan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal memberikan pemerintah daerah lebih banyak otonomi untuk menentukan pengalokasian anggaran, terutama untuk layanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2018) desentralisasi fiskal melalui DAU adalah instrumen penting dalam meningkatkan pembangunan daerah, termasuk indikator-indikator IPM seperti kesehatan dan pendidikan.

Dengan desentralisasi pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan lokal dibandingkan pemerintah pusat, sehingga DAU dapat digunakan lebih efisien untuk pembangunan manusia. Daerah dengan kondisi pendidikan yang buruk, misalnya, dapat mengalokasikan dana alokasi umum untuk program pendidikan yang secara langsung meningkatkan indeks pembangunan manusia

3) Teori Dispartas Regional dan ketidakmerataan

Menurut (Kanbur & Venables, 2005) Disparitas regional merujuk pada perbedaan dalam tingkat pembangunan ekonomi dan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya. Teori ini menganalisis bagaimana perbedaan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur antara daerah maju dan tertinggal dapat menyebabkan ketimpangan yang berkelanjutan dan memperparah disparitas regional.

Ari Kuncoro (2021) menyatakan, "Masalah ketidakmerataan dalam distribusi dan efektivitas penggunaan DAU membuat banyak daerah tertinggal tidak merasakan manfaat signifikan terhadap peningkatan IPM mereka."

Teori ini menjelaskan bahwa meskipun alokasi dana alokasi umum bertujuan untuk mengurangi disparitas antar wilayah, ketidakmerataan dalam distribusi dan efektivitas penggunaan dana seringkali tetap terjadi. Daerah yang sudah maju seringkali tetap mendapatkan bagian besar dari dana alokasi umum, sementara daerah tertinggal yang seharusnya menjadi fokus utama menerima bagian yang relatif kecil. Ini menyebabkan ketimpangan regional terus berlanjut, dan daerah-daerah miskin tetap tertinggal dalam hal indeks pembangunan manusia.

1.1.2.2 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Indonesia. DAK diberikan untuk membantu daerah-daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, yang dianggap sebagai prioritas nasional namun memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk pelaksanaannya. Dana ini biasanya digunakan untuk membiayai proyek-proyek tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud dengan DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai proyek tertentu yang merupakan tanggung jawab daerah dan memenuhi prioritas nasional.

1) Teori Pembangunan Infrastruktur

Teori pembangunan infrastruktur (Paul Romer, 1990) menekankan bahwa investasi dalam infrastruktur fisik adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur meliputi jaringan transportasi (seperti jalan raya, rel kereta api, dan pelabuhan), fasilitas energi (seperti pembangkit listrik dan jaringan distribusi), sistem air dan sanitasi, serta infrastruktur komunikasi. Menurut teori ini, infrastruktur yang baik tidak hanya mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga mendukung penyediaan layanan publik yang lebih baik, seperti pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia.

Infrastruktur mencakup fasilitas fisik yang telah dikembangkan atau diperlukan oleh lembaga-lembaga publik untuk menjalankan tugas pemerintahan, termasuk transportasi, air, listrik, pembuangan limbah, dan layanan-layanan serupa untuk mendukung maksud sosial dan ekonomi. Berdasarkan definisi ini, infrastruktur adalah sistem fisik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia fundamental dalam konteks sosial dan ekonomi.

Infrastruktur terdiri dari bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dari sarana dan prasarana—juga dikenal sebagai jaringan—yang didefinisikan dalam suatu sistem dan dirancang untuk memberikan pelayanan publik yang penting.

Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem untuk memberikan pelayanan publik penting.

2) Teori Desentralisasi fiskal

UU No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan desentralisasi sebagai memberi pemerintah pusat kewenangan wilayah untuk mengelola pemerintahan Republik Indonesia. Meningkatkan pelayanan publik, dan daya saing lokal dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utamanya. Desentralisasi memerlukan dana besar untuk mendanai kewenangan daerah, sehingga desentralisasi fiskal juga diterapkan untuk mendukung pelaksanaannya di Indonesia.

Menurut Oates desentralisasi bertujuan untuk efisiensi sumber daya guna mendorong pertumbuhan ekonomi, karena kebutuhan barang publik di setiap daerah berbeda sesuai preferensi masyarakat dan biaya penyediaannya. Dalam teorinya (2006), jika biaya penyediaan barang publik oleh pemerintah pusat dan daerah sama, lebih efisien jika pemerintah daerah yang melaksanakannya. Desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat yang cenderung memiliki preferensi barang dan jasa publik yang seragam

3) Teori Pengaruh Birokrasi

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pegawai negeri berdasarkan undang-undang, dengan struktur hierarkis di mana pejabat diangkat atau ditunjuk. Garis tanggung jawab dan peraturan mengatur kewenangannya, dan setiap keputusan harus merujuk pada kebijakan yang disahkan

Menurut Niskanen (1971) birokrasi sering kali menghambat efektivitas penggunaan dana pemerintah. Birokrasi yang lamban dan tidak efisien di tingkat daerah

dapat menghambat penyaluran dan pemanfaatan DAK secara optimal, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia menjadi tidak signifikan.

Proses birokrasi yang Panjang dan lambat sering menyebabkan keterlambatan penggunaan dana DAK atau penyalurannya yang tidak tepat waktu pada proyek yang seharusnya. Akibatnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi kurang optimal. Selain itu, banyak daerah menggunakan DAK untuk proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan manusia karena birokrasi yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

2.1.2.3 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan proporsi tertentu dari penerimaan negara yang diperoleh dari sumber daya alam dan pajak yang berada di wilayah daerah tersebut. DBH yaitu bagian dari transfer fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan lebih merata dan memberikan insentif ke daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kemandirian fiskal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan dana bagi hasil (DBH) adalah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan ke daerah sesuai dengan persentase tertentu dalam rangka membantu pembiayaan. DBH merupakan alat penting yang memberi dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja modal dan mengamankan dana untuk pertumbuhan. Potensinya juga besar sebagai sumber pendapatan. Sebagai sumber pendapatan utama daerah, dana bagi hasil (DBH) memiliki potensi besar dan berperan sebagai sarana penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan pendanaan bagi proyek-proyek modal dan pertumbuhan. DBH diterapkan dengan tujuan mengoreksi kesenjangan hierarki antara pemerintah pusat dan daerah, mengakui peran vital wilayah

penghasil pendapatan sebagai pemangku kepentingan utama dalam peningkatan pembangunan daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur, fasilitas, serta meningkatkan mutu layanan kepada publik.

1) Teori Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal (Keynes, 2018) merupakan sebagai alat penting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian makro melalui pengeluaran dan pendapatan negara. Menurut Keynes, kebijakan fiskal melibatkan dua instrumen utama: pengeluaran pemerintah (*government spending*) dan perpajakan (*taxation*)

Teori kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi seperti stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks desentralisasi, kebijakan fiskal juga mencakup bagaimana pendapatan dan pengeluaran dikelola di berbagai tingkatan pemerintahan untuk memastikan distribusi sumber daya yang efektif dan adil.

2) Teori Pembangunan Ekonomi Regional

Menurut Arsyad (2014) Pembangunan ekonomi daerah yaitu upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memanfaatkan sumber daya lokal guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Salah satu instrumen penting yang mendukung pembangunan ekonomi di daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH). DBH adalah alokasi dana dari pemerintah pusat ke daerah, yang berasal dari pendapatan sumber daya alam dan pajak di wilayah tersebut. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi dan kapasitas keuangan daerah dalam mengelola sumber daya mereka. Daerah yang menerima DBH lebih besar dapat

meningkatkan kemampuan mereka untuk menyediakan layanan publik yang lebih baik, mengurangi kesenjangan pembangunan manusia antara daerah kaya sumber daya dan daerah yang kurang maju.

3) Teori Kutukan Sumber Daya Alam

Menurut Auty (2001) menunjukkan bahwa negara-negara yang kaya akan sumber daya alam, seperti gas dan minyak, sering kali memiliki kinerja pembangunan ekonomi dan administrasi pemerintahan yang buruk dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya lebih sedikit. Ironisnya, banyak negara berkembang yang menjadi pengeksport sumber daya alam justru mengalami kualitas hidup yang rendah. Selain itu, kinerja politik negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung lebih buruk. dibandingkan negara lain, sebuah situasi yang dikenal sebagai "paradox of plenty."

Fenomena ini menjelaskan mengapa alokasi DBH dari sumber daya alam sering kali tidak berdampak signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sering kali terjadi penyalahgunaan atau pengelolaan yang tidak efektif, sehingga tidak memenuhi kebutuhan pembangunan manusia secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberlimpahan sumber daya alam tidak selalu menjamin perbaikan dalam kualitas hidup Masyarakat.

2.1.2.4 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja dalam bidang tata kelola keuangan daerah, layanan publik umum, layanan dasar publik, dan kesejahteraan umum (Keuangan et al., n.d.).

Pemberian DID didasarkan pada beberapa kriteria kinerja utama, termasuk:

1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah: Daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memiliki peluang lebih besar untuk menerima DID.
2. Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah: Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
3. Indikator Kesejahteraan Sosial: Seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator sosial-ekonomi lainnya.
4. Inovasi Daerah: Daerah yang menunjukkan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik juga mendapat perhatian dalam penilaian untuk DID.

DID dirancang untuk mendorong persaingan sehat antar daerah sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya insentif ini, diharapkan daerah akan lebih berkomitmen dalam mengelola sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab.

1) Teori Penguatan Desentralisasi Fiskal

Teori penguatan desentralisasi fiskal menekankan pentingnya pelimpahan kepada pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. layanan publik. Dalam UU No. 33 Tahun 2004, desentralisasi fiskal melibatkan penyerahan otoritas pemerintahan kepada negara bagian yang otonom untuk mengelola urusan pemerintah dalam sistem NKRI. Tujuan dari desentralisasi fiskal ini ialah memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, yang sangat penting dalam mendukung program layanan dasar publik. Dengan desentralisasi fiskal, kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditingkatkan, karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak kebebasan dalam mengelola sumber daya keuangan, dan mereka dapat

memberikan kekuasaan administrasi dan politik untuk menyediakan layanan publik, dengan dukungan keuangan dari pemerintah pusat.

Teori ini menggarisbawahi pentingnya kemandirian daerah, di mana daerah mampu menggali dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi masing-masing, sehingga dapat mendukung pembangunan lokal secara mandiri. Peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan antar daerah, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan public sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan IPM.

2) Teori Pembangunan Manusia

Teori pembangunan manusia menurut Amartya sen, (1999) menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan, tetapi dari kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Esensi dari teori ini adalah memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih dan mencapai kehidupan yang mereka anggap berharga. Konsep utama dari pendekatan ini adalah kapabilitas, yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk mencapai hal-hal yang diinginkannya dalam hidup, seperti kesehatan yang baik, pendidikan, dan partisipasi sosial. Kapabilitas ini memberikan peluang bagi individu untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Sen juga menekankan pentingnya kebebasan, di mana pembangunan adalah perluasan kebebasan manusia, termasuk kebebasan ekonomi, sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Selain itu, Sen melihat kemiskinan sebagai "kekurangan kapabilitas", bukan hanya kekurangan pendapatan, yang berarti bahwa seseorang yang kekurangan akses terhadap layanan dasar mungkin tidak mampu mencapai potensi hidupnya.

Pembangunan menurut Sen juga harus dipandang sebagai proses dan tujuan, di mana penciptaan kondisi yang memungkinkan semua individu memiliki akses yang

setara untuk menjalani kehidupan bermakna adalah inti dari pembangunan. Kapabilitas yang dimiliki individu saling terkait, seperti bagaimana pendidikan yang baik dapat meningkatkan kesehatan dan partisipasi sosial, menciptakan siklus yang saling mendukung dalam pembangunan. Pendekatan kapabilitas ini kemudian sangat relevan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan sebagai refleksi dari upaya memperluas kapabilitas manusia.

Dana Insentif Daerah (DID) berpengaruh terhadap IPM karena insentif ini bertujuan untuk mendorong daerah meningkatkan kinerja dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi. Peningkatan dana ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, seperti fasilitas kesehatan yang lebih baik, akses pendidikan yang lebih luas, dan program-program peningkatan kesejahteraan. Semua hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kapabilitas masyarakat, sesuai dengan pendekatan Sen, yang pada akhirnya mendorong perbaikan dalam dimensi-dimensi yang diukur oleh IPM.

3) Teori Implementasi Kebijakan Publik

Dalam buku yang berjudul "Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland" Jeffrey L. Pressman, (1973) mengembangkan pemahaman mendalam tentang proses implementasi kebijakan publik. Implementasi didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas dan interaksi yang terjadi setelah sebuah kebijakan diadopsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Menurut mereka, implementasi bukan hanya tahap pasif yang mengikuti pembuatan kebijakan, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, dan kondisi yang berbeda-beda.

Pressman dan Wildavsky menekankan bahwa implementasi kebijakan publik sering kali lebih rumit dan penuh tantangan daripada yang dibayangkan oleh para pembuat kebijakan. Mereka mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab utama kegagalan implementasi adalah banyaknya titik keputusan (decision points) yang harus dilalui selama proses implementasi. Setiap titik keputusan ini merupakan potensi hambatan yang dapat memperlambat atau menghalangi pencapaian tujuan kebijakan. Dengan kata lain, semakin banyak titik keputusan, semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut gagal diimplementasikan sesuai rencana.

Implementasi kebijakan publik menekankan pentingnya proses dan mekanisme dalam penerapan kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks DID, kualitas implementasi sangat menentukan hasil akhir. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola, dan memantau proyek-proyek yang dibiayai oleh DID dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efektif. Seringkali, masalah ini muncul karena kurangnya kapasitas teknis dan administrasi di tingkat daerah, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, dampak positif dari DID terhadap IPM bisa menjadi tidak signifikan atau bahkan negatif

2.1.2.5 Dana Desa

Buku Saku Dana Desa Kementerian Keuangan (2017) menyatakan bahwa dana desa datang dari Pemerintah Pusat dan didistribusikan secara merata juga adil untuk tujuan desa. Secara bertahap, 10% dari dana Transfer Daerah dialokasikan langsung ke desa. Dana Desa ditetapkan berdasarkan jumlah desa, kemiskinan, jumlah penduduk, masalah geografis, dan luas area. Desa harus melakukan penatausahaan belanja dengan baik setelah mengumpulkan seluruh pendapatannya dari berbagai sumber. Penatausahaan belanja yang baik memungkinkan desa memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan lebih lanjut dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan

mengelola aset, khususnya sewa. Ada kemungkinan bidang yang didanai akan digunakan untuk membagi belanja.

1) Teori Desentralisasi fiskal

Teori desentralisasi fiskal menekankan pentingnya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan alokasi anggaran. Di Indonesia, Dana Desa merupakan implementasi nyata dari desentralisasi fiskal, yang memungkinkan desa untuk mengelola anggaran secara mandiri guna meningkatkan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Bahl, R., & Linn, (2014) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat mempercepat proses pembangunan manusia dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh wilayah masing-masing.

Dengan adanya alokasi dana yang langsung disalurkan ke desa, pemerintah desa memiliki fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Contohnya, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan baru, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, atau memperbaiki infrastruktur, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan akses dan kualitas layanan publik. Peningkatan kualitas pendidikan memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang dapat berujung pada peningkatan produktivitas dan pendapatan mereka. Di sisi lain, perbaikan dalam layanan kesehatan juga berpengaruh positif pada harapan hidup dan kualitas hidup masyarakat.

Desentralisasi fiskal melalui Dana Desa memiliki potensi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan menyediakan lebih banyak sumber daya kepada desa-desa yang kurang berkembang, Dana Desa dapat membantu

memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi serta mempercepat proses pembangunan di daerah tersebut. Dalam hal ini, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya. Melalui pendekatan ini, desentralisasi fiskal tidak hanya memberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat desa untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.

2) Teori Pembangunan Berkelanjutan

Teori Pembangunan Berkelanjutan menekankan pentingnya memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses pembangunan manusia. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk tidak hanya meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini, tetapi juga menjaga agar sumber daya alam dan kesejahteraan sosial dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dana Desa menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat pedesaan. Melalui pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk proyek infrastruktur yang berkelanjutan, seperti pembangunan jalan, jembatan, sistem irigasi, serta infrastruktur publik lainnya yang meningkatkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat desa.

Pembangunan infrastruktur yang didukung oleh Dana Desa tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Akses jalan yang lebih baik, misalnya, dapat meningkatkan mobilitas masyarakat desa, membuka peluang ekonomi, memperlancar perdagangan, dan memfasilitasi akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, pembangunan irigasi yang berkelanjutan juga dapat mendukung

sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi di banyak desa, sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.

Menurut Sachs (2015) pembangunan yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dengan kesejahteraan sosial akan berdampak positif pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Dalam hal ini, dengan membangun infrastruktur berkelanjutan yang mengurangi kesenjangan sosial dan memperbaiki lingkungan, Dana Desa secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di wilayah pedesaan. Peningkatan IPM ini dapat terlihat dari meningkatnya harapan hidup, kualitas pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Selain itu, pembangunan yang berfokus pada keberlanjutan juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat di desa dapat menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Sehingga, *Dana Desa* tidak hanya membantu mengatasi masalah infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di pedesaan Indonesia.

3) Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban (Donaldson & Davis, 1991), juga dikenal sebagai *stewardship theory*, manajemen termotivasi untuk tujuan organisasi daripada tujuan pribadi. Menurut *stewardship theory*, manajemen memiliki kemampuan untuk berperilaku dengan cara yang akan menguntungkan banyak orang. Dengan demikian, kepuasan pelanggan dan kesuksesan organisasi terkait erat. Teori *stewardship* dalam pengujian ini bahwa, sebagai asosiasi publik, kota harus mempunyai pilihan untuk mengurus apa yang dibagikan kepada mereka.

Dalam peninjauan ini, pemerintah pusat bertindak sebagai pelopor, dan pemerintahan desa, yang ditunjuk untuk mengelola pendanaan. Intinya adalah untuk

mencapai tujuan yang ditentukan yang sesuai dengan sifat luar biasa dan beragam dari setiap desa di Indonesia. Hal ini akan mempengaruhi target utama dana desa, khususnya meningkatkan pencapaian bantuan pemerintah pada jaringan desa. Kurangnya tanggung jawab pelaksanaan adalah cara paling efektif untuk mengukur sifat pemerintahan

Otoritas publik mengambil pandangan dunia bekerja dari pinggiran, dimulai dari daerah yang belum berkembang dan pedesaan. Hal ini diharapkan dapat menghilangkan perbedaan yang ada antara kabupaten, kota, dan perkotaan. Otoritas publik menjunjung tinggi kemajuan negara. Memperkuat basis keuangan, mendesak pengurangan kemiskinan, dan mendesak penurunan penyimpangan antara daerah sangatlah penting. Desa juga memainkan peranan penting dalam mengubah tuntutan sosial. Di sini, pemerintah memulai proses yang terkait dengan bagaimana dana ditransfer dari pusat pemerintah dan daerah ke pemerintah desa. Otonomi desa mencakup pengelolaan keuangan desa (Prasetyo et al., 2015).

Teori pertanggungjawaban menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan Dana Desa. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas proyek yang didanai, karena masyarakat lokal lebih memahami kebutuhan dan prioritas mereka. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DD sering kali masih rendah. Kurangnya partisipasi dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara proyek yang dilaksanakan dan kebutuhan masyarakat, sehingga mengurangi dampak positif DD terhadap IPM. Oleh karena itu, meskipun DD memiliki potensi untuk meningkatkan IPM, dampaknya mungkin tidak signifikan jika partisipasi masyarakat tidak optimal.

2.2 Kajian Empiris

Penelitian empiris merupakan landasan penting dalam mengkaji pengaruh kebijakan atau variabel tertentu terhadap aspek-aspek pembangunan. Kajian ini berfokus pada berbagai penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh Dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah, Dan Dana Desa terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Melalui analisis hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi pola hubungan, faktor-faktor penentu, serta kendala yang muncul dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa penelitian dari beberapa ahli:

Tabel 2. 1 Kajian Empiris

No.	Nama penulis	Judul jurnal	Variabel	Hasil
1.	Tri Asmeli Sembiring (2020)	Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana alokasi umum (dau), dan dana alokasi khusus (dak) fisik terhadap pembangunan manusia di provinsi sumatera utara (periode 2016 – 2018)	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : PAD (X ₁) DAU (X ₂) DAK (X ₂)	X ₁ = Berpengaruh Signifikan X ₂ = Tidak berpengaruh Signifikan X ₃ = Tidak berpengaruh Signifikan
2.	Martin Tamaro Siburian, Muhammad Agrata Abdullah, Amrie Firmansyah (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : PAD (X ₁) DAU (X ₂) DAK (X ₃) DBH (X ₄) Dana perimbangan (X ₅)	X ₁ = berpengaruh positif X ₂ = berpengaruh tidak signifikan X ₃ = berpengaruh positif X ₄ = berpengaruh negatif X ₅ = berpengaruh positif

No.	Nama penulis	Judul jurnal	Variabel	Hasil
3.	Ifan Maulana, Ichsan (2022)	Pengaruh produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera utara	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : PDRB (X ₁) PAD (X ₂) DAU (X ₃)	X ₁ = + dan Signifikan X ₂ = tidak berpengaruh Signifikan X ₃ = - dan Signifikan
4.	Rubiyanto, Prince Charles Heston Runtuuwu, Amran Husen (2023)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Indeks Pembangunan Manusia Di Maluku Utara	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi khusus (X ₁) Dana alokasi umum (X ₂) Dana bagi hasil (X ₃)	X ₁ = Positif dan Tidak Signifikan X ₂ = Positif dan Signifikan X ₃ = Positif dan Tidak Signifikan
5.	Heniwati Gulo, Fitrawaty, Arwansyah (2023)	Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi khusus (X ₁) Dana alokasi umum (X ₂) Pendapatan asli daerah (X ₃)	X ₁ = +/Signifikan X ₂ = +/Signifikan X ₃ = +/Signifikan
6.	Rubiyanto, Prince Charles Heston Runtuuwu, Amran Husen (2023)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Indeks	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi umum (X ₁)	X ₁ = + dan tidak Signifikan X ₂ = + dan Signifikan X ₃ = + dan Tidak Signifikan

No.	Nama penulis	Judul jurnal	Variabel	Hasil
		Pembangunan Manusia Di Maluku Utara	Dana alokasi khusus (X_2) Dana bagi hasil (X_2)	
7.	Aprilia Hutagaol, Joko Suharianto, Senta Rina Damanik, Kezia Br Aritonang (2024)	Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 2010-2021	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi Umum (X_1) Dana alokasi khusus (X_2)	X_1 = Positif dan Signifikan X_2 = Positif dan Tidak Signifikan
8.	Hyllda Annisa Aurora, Kiky Asmara (2024)	Pengaruh dana alokasi umum, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten purwakarta	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi umum (X_1) Rata rata lama sekolah (X_2) Pertumbuhan ekonomi (X_3)	X_1 = Signifikan X_2 = positif dan Signifikan X_3 = positif dan Signifikan
9.	Heniwati Gulo, Fitrawaty, Arwansyah (2024)	Analisis pengaruh dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara	Dependent: Indeks Pembangunan Manusia (Y) Independent : Dana alokasi Khusus (X_1) Dana alokasi umum (X_2) Pendapatan asli daerah (X_3)	X_1 = Positif dan Signifikan X_2 = Positif dan Signifikan X_3 = Positif dan Signifikan
10.	Aprilia Hutagaol, Joko Suharianto,	Pengaruh Dana Alokasi Umum	Dependent: Indeks Pembangunan	X_1 = +/-Signifikan

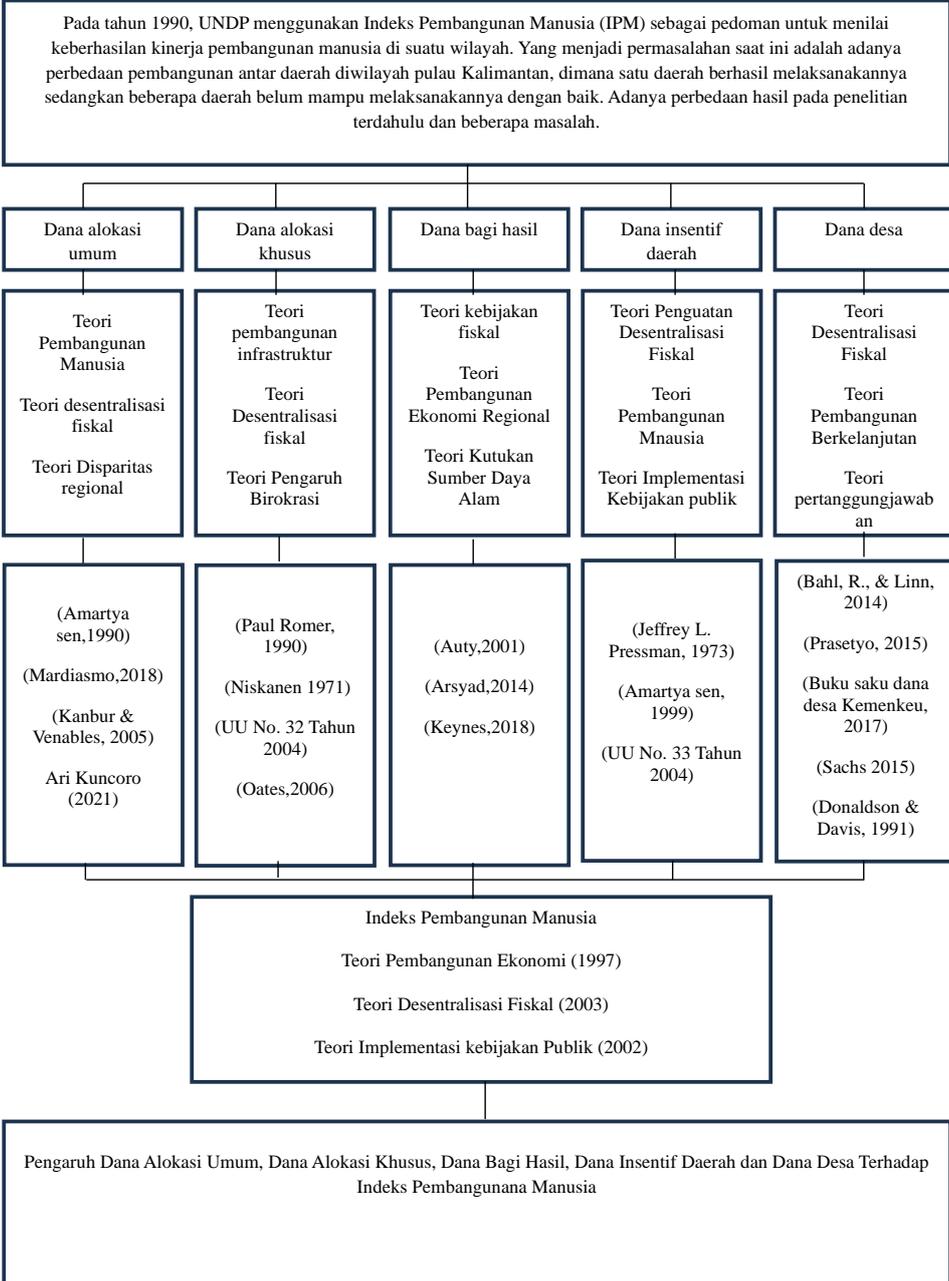
No.	Nama penulis	Judul jurnal	Variabel	Hasil
	Senta Rina Damanik, Kezia Br Aritonang (2024)	dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 2010-2021	an Manusia (Y) Independent : Dana alokasi umum (X ₁) Dana alokasi khusus (X ₂)	X ₂ = +/-Tidak Signifikan
11.	Arthaingan H. Mutiha (2018)	The effect of financial ratio to human development index (based on the study in districts and cities of west java)	Dependent: Human Development Index (Y) Independent : Derajat Desentralisasi (X ₁), Regional Financial Independence Ratio (X ₂) Ratio Of Compatibility Expenditure (X ₃)	X ₁ = -/Tidak Signifikan X ₂ = -/Tidak Signifikan X ₃ = +/-Signifikan
12.	Korhan k. Gokmenoglu, martins olugbenga apinran, nigar taspinar (2018)	Impact of foreign direct investment on human development index in nigeria	Dependent: Human Development Index (Y) Independent : Foreign Direct Investment (X ₁),	X ₁ = +/-Signifikan
13.	Alexei yumashev, beata slusarczyk , sergey kondrashev and alexey Mikhaylov (2020)	Global indicators of sustainable development: evaluation of the influence of the human development index on consumption and quality of energy	Dependent: Human Development Index (Y) Independent : Volume Of Energy Consumption (X)	X = +/-Signifikan
14.	<u>Sabyasachi tripathi (2021)</u>	How does urbanization affect the human development	Dependent: Human Development Index (Y)	X ₁ = +/-Signifikan X ₂ = +/-Signifikan

No.	Nama penulis	Judul jurnal	Variabel	Hasil
		index? A cross-country analysis	Independent : Total Urban Populations (X ₁), Percentage Of The Urban Populations (X ₂) Urban Population Growth Rates (X ₃) Percentage Of The Population Living In Million-Plus Agglomerations (X ₄)	X ₃ = +/-Signifikan X ₄ = +/-Signifikan
15.	Paneljiajia zheng, xingwu wang (2022)	Impacts on human development index due to combinations of renewables and icts --new evidence from 26 countries Paneljiajia zheng , xingwu wang	Dependent: Human Development Index (Y) Independent : Renewables Energy (X ₁), Icts (Information Communication Technologies) (X ₂)	X ₁ = Tidak Signifikan X ₂ = +/- Tidak Signifikan X ₁ Dan X ₂ = Signifikan

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memudahkan pemahaman penelitian untuk mencapai tujuan dan membuat kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dan Produk Domestik Regional bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat” menetapkan dana alokasi umum sebagai (X₁), dana alokasi khusus sebagai (X₂),

dana bagi hasil sebagai (X3), dana insentif daerah sebagai (X4), dana desa sebagai (X5) yang akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

1. Hubungan Dana alokasi umum dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal di antara mereka. DAU digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), atau dengan kata lain IPM akan meningkat. (Pradnyantari & Dwirandra, 2017). Pengujian membuktikan kalau DAU meningkatkan IPM secara signifikan (Rohmahwati, 2021). Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, atau PAD, dan Dana Alokasi Khusus, atau DAK, adalah yang paling berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, menurut diskusi tentang dana transfer (DAU, DBH, DAK, dan pendapatan lain yang sah). Nilai keserbagunaan individu atau dampak absolut dapat menunjukkan dampak ini. (Suhyanto et al., 2020),

2. Hubungan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Khusus (DAK) membiayai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum terpenuhi atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. (P. Saswatata, 2021). Kesimpulan berikutnya menunjukkan bahwa DAU, DAK Fisik dan Nonfisik, baik secara bersamaan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan terhadap IPM (Suhyanto et al., 2020). Penelitian terdahulu yang mendukung bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap IPM adalah penelitian (S. S. Saswatata & Parju, 2022).

3. Hubungan Dana bagi hasil dengan Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan uang yang dihasilkan dari sumber daya alam dan pajak, dianggap sebagai sumber pendapatan yang sangat potensial bagi pemerintah daerah dan merupakan salah satu modal dasar bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan. Diharapkan DBH dapat mengimbangi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan, yang berdampak pada kualitas pembangunan manusia (Kurniasari, 2021). Penelitian terdahulu menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan DBH untuk pembiayaan dengan pengalokasian yang tepat, tindakan pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penemuan ini diperkuat oleh temuan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah (Lestari et al., n.d.). Penelitian menurut (Ina & Hudang, 2024) menerapkan metode regresi data panel untuk menganalisis dampak DBH, DAU, dan DAK terhadap IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

4. Hubungan Dana insentif daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Sangat jarang sekali penelitian mengenai dana insentif daerah terhadap indeks pembangunan manusia

5. Hubungan Dana Desa dengan Indeks Pembangunan Manusia

Penelitian (m. Afrizal yusuf, 2019) bahwa Dana Desa berdampak positif pada Indeks Pembangunan Manusia di setiap kabupaten di Jawa Barat. Menurut (Dydhya, 2017) hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Desa, DBH,

DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap komponen-komponen IPM. A'fifah, (2021) mengatakan Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan Dana Desa, PAD, dan Dana Perimbangan, serta analisis data panel untuk menguji pengaruh Dana Desa, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap komponen IPM, yakni AHH, RLS, dan PPP di Indonesia. Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa Dana Desa, DBH, DAU, dan DAK secara positif dan signifikan memengaruhi komponen-komponen IPM.

2.4 Hipotesis

Terlebih dahulu, hipotesis yang digunakan ditentukan sebelum melakukan analisis. Hipotesis adalah solusi temporer untuk masalah penelitian; itu harus dipelajari dan diteliti menggunakan data yang dikumpulkan sebelum diuji secara empirik. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut, dengan mengacu pada landasan teori dan kajian empirik:

a. Secara Parsial

- 1) H1 : Dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau kalimantan.
- 2) H2 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau kalimantan.
- 3) H3 : Dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau kalimantan.
- 4) H4 : Dana insentif daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau kalimantan.
- 5) H5 : Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau kalimantan.

b. Secara Simultan

Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten pulau Kalimantan dipengaruhi signifikan oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dana insentif daerah dan dana desa.